

KESIAPSIAGAAN TIM BAPENA PPNI DALAM MENANGANI KORBAN BENCANA TANAH LONGSOR DI KOTA SEMARANG

Arinda Syafira Sahara Sandy, Budi Puspo Priyadi

Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7460024 Faksimile (024) 7460027
Laman : <https://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Semarang City recorded the highest landslide incident in Central Java in 2023 so preparedness is key in disaster management. Bapena PPNI strives to prevent fatalities through various preparedness measures, although it still faces obstacles in the ability to mobilize resources. This study aims to identify the preparedness of the Bapena PPNI team in responding to landslide disaster victims in Semarang City. This study uses a qualitative method using primary and secondary data sources. The results of the study show that preparedness has been carried out through personnel preparation, a clear organizational structure, cooperation with related agencies, and allocation of aid funds. However, there are obstacles such as lack of independent training, limited personnel who must carry out two roles, and limited medical equipment. Although preparedness is in line with the concept of disaster management, it can be said that its implementation is not yet optimal. Therefore, a more comprehensive approach is needed, including empowering members, forming a standby team, and improving facilities through partner cooperation to improve the effectiveness of health services.

Keywords: Preparedness, Landslide Disaster, Semarang City

ABSTRAK

Kota Semarang mencatat kejadian tanah longsor tertinggi di Jawa Tengah pada tahun 2023 sehingga kesiapsiagaan menjadi kunci dalam penanggulangan bencana. Bapena PPNI berupaya mencegah korban jiwa melalui berbagai langkah kesiapsiagaan, meskipun masih menghadapi kendala dalam kemampuan mobilisasi sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesiapsiagaan tim Bapena PPNI dalam merespons korban bencana tanah longsor di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapsiagaan telah dilakukan melalui penyiapan personel, struktur organisasi yang jelas, kerja sama dengan instansi terkait, dan alokasi dana bantuan. Namun, terdapat kendala seperti kurangnya pelatihan mandiri, keterbatasan personel yang harus menjalankan dua peran, serta keterbatasan peralatan medis. Meskipun kesiapsiagaan sejalan dengan konsep manajemen bencana, namun dapat dikatakan implementasinya belum tergolong optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lebih komprehensif, termasuk pemberdayaan anggota, pembentukan tim siaga, serta peningkatan fasilitas melalui kerja sama mitra untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan.

Kata Kunci: Kesiapsiagaan, Bencana Tanah Longsor, Kota Semarang

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang pesat menciptakan perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan luas wilayah yang tetap, yakni sebesar 373,78 km², kepadatan penduduk bertambah dari 4.432 jiwa/km² menjadi 4.534 jiwa/km² (BPS, 2024). Peningkatan jumlah penduduk di Kota Semarang telah memicu kebutuhan akan lahan yang semakin besar untuk pembangunan pemukiman. Dengan ketersediaan lahan yang terbatas maka terjadi alih fungsi lahan yang dapat berdampak pada lingkungan dan tata ruang kota (Paul & Rashid, 2017 dalam Zahra et al., 2021). Pada periode 2021-2023, luas lahan menyusut dari 2.218,79 Ha menjadi 2.212,52 Ha atau berkurang sekitar 0,28% dari total luas lahan awal (Dispertan, 2023).

Peningkatan jumlah penduduk yang cepat memaksa perubahan penggunaan lahan secara besar-besaran. Hal ini, jika tidak memperhitungkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, dapat memicu penurunan muka tanah dan menyebabkan risiko bencana tanah longsor. Bencana tanah longsor dipengaruhi oleh

Berdasarkan kajian data dampak bencana tanah longsor, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan bencana sangat penting dan diperlukan. Sesuai dengan kebijakan nasional, upaya

berbagai faktor, yaitu musim penghujan, kondisi topografi, jenis tanah dan batuan. Berdasarkan data kejadian tanah longsor di berbagai daerah Jawa Tengah pada tahun 2023, Kota Semarang mencatat jumlah kejadian tertinggi dibandingkan daerah lain, seperti Banyumas (33 kejadian), Kebumen (20 kejadian), Grobogan (9 kejadian), Cilacap (5 kejadian), Jepara dan Kendal (2 kejadian) (DIBI BNPB, 2023). Tingginya angka kejadian ini menyebabkan dampak yang signifikan, termasuk kerusakan rumah, terputusnya infrastruktur, dan korban jiwa. Dengan banyaknya wilayah rawan longsor di Kota Semarang, angka kejadian ini menunjukkan bahwa bencana tanah longsor telah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup masyarakat Kota Semarang.

Tabel 1.1

Dampak Bencana Tanah Longsor

<u>Tahun</u>	<u>Jumlah Kejadian</u>	<u>Korban (Meninggal, Terluka, Menderita, Mengungsi)</u>	<u>Kerugian</u>
2021	127	138	52.500.000
2022	121	142	1.827.000.000
2023	52	198	2.438.000.000
Total	300	478	4.317.500.000

Sumber : Diolah oleh peneliti (2024)

penanggulangan bencana utamanya difokuskan pada langkah-langkah yang dilakukan pada saat pra-bencana salah satunya adalah kesiapsiagaan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

tentang Penanggulangan Bencana, kesiapsiagaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kegiatan ini sebagai bentuk persiapan yang meliputi pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya manusia dan logistik.

Mengingat tingginya risiko bencana tanah longsor yang dapat menyebabkan banyaknya korban jiwa, keberadaan tenaga kesehatan yang siap siaga sangat diperlukan untuk memberikan pertolongan medis kepada masyarakat yang terdampak. Perawat, sebagai garda terdepan dalam bidang kesehatan, memiliki peran krusial dalam memberikan pertolongan pertama dan perawatan medis kepada korban bencana alam, khususnya tanah longsor (Doondori et al., 2021). Untuk menangani bencana, perawat perlu memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan khusus dalam situasi darurat (Cut, dkk., 2011 dalam Azizah et al., 2015). Melihat pentingnya penanganan korban bencana tanah longsor, Dinas Kesehatan Kota Semarang mendapat dukungan dari Badan Penanggulangan Bencana Persatuan Perawat Nasional Indonesia (Bapena PPNI) Kota Semarang sebagai bagian dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia

(PPNI). Bapena PPNI Kota Semarang sebagai salah satu dari sebagian besar tenaga kesehatan memiliki andil dalam penanganan korban bencana tanah longsor.

Menghadapi bencana tanah longsor di Kota Semarang, tenaga perawat Bapena PPNI harus memiliki kesiapsiagaan yang tinggi. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan dan simulasi bencana secara berkala untuk meningkatkan kemampuan perawat (Setyawati et al., 2020 dalam Ihsan et al., 2022). Meskipun para perawat Bapena PPNI Kota Semarang sudah memiliki pengalaman dalam penanganan korban bencana, namun pelatihan yang diikuti belum terorganisir dengan baik. Sebagian besar pelatihan dilakukan secara mandiri melalui *webinar* atau *workshop online*. Selain itu, peralatan medis yang digunakan oleh Bapena PPNI Kota Semarang saat ini masih mengandalkan peralatan medis yang berasal dari tempat kerja para perawatnya. Artinya, Bapena PPNI belum memiliki peralatan medis yang lengkap dan mandiri. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengidentifikasi wujud kesiapsiagaan tim Bapena PPNI dalam memberikan respon terhadap korban bencana tanah longsor; 2) Mengidentifikasi aksi kesiapsiagaan yang telah dilakukan Bapena PPNI untuk mengatasi korban bencana tanah longsor; dan 3) Mengidentifikasi kesesuaian kesiapsiagaan

Bapena PPNI dengan teori atau konsep manajemen bencana

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait di lokasi penelitian, sementara data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya seperti, artikel jurnal, buku, dan situs *website* yang relevan dengan topik kesiapsiagaan bencana dalam konteks praktik keperawatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang mendalam dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengamatan secara langsung dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan kebutuhan penelitian yang sedang dilakukan. Hasil dan uraian penelitian tentang kesiapsiagaan tim Bapena PPNI dalam menangani korban bencana tanah longsor di Kota Semarang dikaitkan dengan teori kesiapsiagaan yang menggunakan 5 indikator, yaitu pengetahuan, sikap kesiapsiagaan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan dini, dan kemampuan mobilisasi sumber daya. Beserta aksi kesiapsiagaan yang melibatkan 3 indikator,

yaitu kesiapan sumber daya, kelembagaan dan pendanaan

Wujud Kesiapsiagaan Tim Bapena PPNI dalam Menangani Korban Bencana Tanah Longsor

Sebagai organisasi yang berfokus pada sektor kesehatan, Bapena PPNI berperan dalam menangani korban bencana tanah longsor di Kota Semarang. Upaya kesiapsiagaan ini bertujuan untuk mempersiapkan tenaga perawat yang handal dan profesional sehingga penanganan korban bencana dapat dilakukan secara lebih terorganisir dan mendukung upaya penanggulangan bencana yang bersifat kolaboratif bersama pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, dan profesi lainnya. Kegiatan kesiapsiagaan ini dapat diukur melalui lima indikator utama yang dirumuskan oleh LIPI-UNESCO/ISDR tahun 2006. Indikator tersebut meliputi pengetahuan, sikap kesiapsiagaan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan dini, dan kemampuan mobilisasi sumber daya.

1. Pengetahuan dan Sikap

Pengetahuan merupakan fondasi utama dalam membangun kesiapsiagaan suatu komunitas menghadapi bencana. Pengetahuan, yang didefinisikan sebagai hasil dari

pemahaman terhadap suatu objek, memegang peranan krusial dalam konteks kebencanaan. Bapena PPNI, sebagai badan penanggulangan bencana dalam profesi keperawatan, perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai bencana tanah longsor, termasuk penyebab, tanda-tanda, dan aspek terkait lainnya. Hal ini penting agar tim Bapena PPNI mampu menghadapi potensi serta kompleksitas bencana dan dampaknya yang berpotensi lebih besar di masa depan.

Pengetahuan tentang risiko dan penyebab tanah longsor memungkinkan perawat Bapena untuk memprediksi potensi lokasi terjadinya bencana. Dengan demikian, perawat dapat mempersiapkan diri dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan respon yang cepat dan tepat saat bencana terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, Bapena PPNI Kota Semarang telah memiliki pemahaman mengenai bencana tanah longsor dapat dicapai melalui beragam pendekatan. Baik melalui kegiatan pelatihan dan koordinasi yang intensif, maupun melalui pengembangan program-program khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bidang. Kombinasi ini akan menghasilkan kapasitas yang lebih baik dalam menghadapi dan

mengurangi risiko bencana. Selain itu, Bapena PPNI Kota Semarang juga telah proaktif dalam melakukan upaya pencegahan dini bencana tanah longsor. Hal ini terlihat dari kegiatan pemantauan data curah hujan dan mitigasi berupa pemetaan daerah rawan bencana. Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Bapena PPNI Kota Semarang telah menyiapkan personel yang dilengkapi dengan alat komunikasi di daerah-daerah yang berpotensi terjadi longsor, yang mana koordinasi antar personel difasilitasi melalui grup *WhatsApp*.

2. Rencana Tanggap Darurat

Rencana tanggap darurat berperan penting dalam mengantisipasi keadaan darurat, yang mana rencana ini dibuat agar pihak yang bersangkutan mengetahui apa yang harus dilakukan. Dari hasil analisis pengkajian rencana tanggap darurat oleh tim Bapena PPNI Kota Semarang terdapat beberapa poin yang mampu mencerminkan tindakannya untuk mengantisipasi bencana tanah longsor. Baik itu melibatkan rencana evakuasi korban, kesiapan pengambilan tindakan maupun kesertaan komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan pihak yang terlibat untuk mempersiapkan kesiapsiagaan organisasi. Dalam

rencana evakuasi korban, Bapena PPNI Kota Semarang terdapat *meeting* atau koordinasi sebagai bentuk rangkaian awal sebelum melakukan tindakan atau terjun ke lapangan. Bapena juga memiliki kesiapan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung upaya penanganan korban bencana serta memenuhi berbagai kebutuhan yang diperlukan di lapangan. Kesiapan ini tidak terlepas dari peran penting kerja sama dan koordinasi yang solid dengan berbagai pihak terkait.

Selain itu, kesiapan yang dilakukan oleh Bapena PPNI tidak hanya berfokus pada penanganan korban, tetapi juga melibatkan upaya-upaya preventif untuk mengurangi risiko timbulnya korban bencana tanah longsor. Upaya mitigasi dalam situasi bencana tidak hanya difokuskan pada pencegahan awal, tetapi juga pada langkah-langkah untuk meminimalkan dampak lanjutan, termasuk mencegah bertambahnya jumlah korban. Hal ini dilakukan melalui berbagai tindakan, seperti skrining kesehatan dan penyuluhan dengan melibatkan tim *recovery* perawat. Selain itu, pendekatan psikososial seperti Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) digunakan untuk membantu korban mengatasi trauma dan mengalihkan perhatiannya

dari kesedihan akibat bencana. Tindakan ini menunjukkan pentingnya penanganan yang holistik, baik dari aspek fisik maupun mental, dalam rangka mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana.

Kesiapan suatu organisasi membutuhkan komunikasi dan koordinasi, kedua hal ini memiliki peran krusial untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan korban bencana. Melalui keterlibatan berbagai *stakeholders* komunikasi dan koordinasi penting dalam menjalankan tindakan tanggap darurat penanganan korban. Dalam hal ini, Bapena PPNI menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti BPBD, PMI, Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas, dengan peran spesifik sesuai tugas harian masing-masing. Koordinasi dalam hal ini dijaga melalui pembaruan rutin terkait perkembangan situasi.

3. Sistem Peringatan Dini

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa peringatan dini mencakup serangkaian tindakan yang meliputi pengamatan dan analisis gejala bencana, pengambilan keputusan, penyebaran informasi

serta pengambilan tindakan terhadap potensi atau ancaman bencana. Adanya tindakan berupa penyebaran informasi ini bertujuan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat serta pihak-pihak terkait agar dapat mempersiapkan langkah antisipatif yang diperlukan.

Bapena PPNI menjalankan dua pola koordinasi dalam penanganan korban bencana. Pertama, menunggu panggilan dari puskesmas atau Pemkot melalui ketua profesi PPNI kemudian ke Bapena. Kedua, secara proaktif menanyakan kebutuhan tenaga kesehatan atau klinik darurat kepada puskesmas atau Dinas Kesehatan. Kedua pola ini dinilai efektif, didukung dengan pemantauan informasi terbaru dari BMKG dan sumber lain secara berkala.

4. Kemampuan Mobilisasi Sumber Daya

Kemampuan mobilisasi sumber daya merupakan elemen dalam menjaga keberlanjutan operasional sebuah organisasi. Hal ini tidak hanya mencakup ketersediaan sumber daya fisik, tetapi juga melibatkan optimalisasi potensi sumber daya manusia. Partisipasi aktif anggota dalam berbagai kegiatan pengembangan, seperti pelatihan,

simulasi kesiapsiagaan bencana, dan pengelolaan sumber daya, menjadi indikator penting dari seberapa baik organisasi mampu membangun kapasitas internalnya. Bapena PPNI belum mengadakan pelatihan maupun simulasi secara mandiri dan belum terkoordinir dengan baik, hal ini dikarenakan belum disetujui proposal kegiatan dari pusat. Namun, Bapena PPNI telah mengikuti berbagai pelatihan dan simulasi bencana yang diselenggarakan oleh kota atau provinsi seperti yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan. Meskipun terdapat agenda atau rencana untuk melakukan kerja sama pelatihan, namun hingga saat ini belum ada tindakan nyata yang dilakukan untuk mewujudkannya. Saat ini, pelatihan yang tersedia baru sebatas krisis manajemen kesehatan, manajemen bencana, serta pelatihan keperawatan seperti BTCLS (*Basic Trauma Cardiac Life Support*) yang berfokus pada penanganan jalan napas dan CPR, serta ACLS (*Advanced Cardiac Life Support*) yang berkaitan dengan penanganan gagal jantung. Selain itu, Bapena PPNI Kota Semarang menghadapi tantangan internal yang perlu segera diatasi khususnya untuk memastikan bantuan kesehatan dapat tersalurkan secara maksimal, yaitu

beberapa individu memiliki dua tanggung jawab sekaligus (*double jobdesk*), yang dapat menyebabkan kelelahan kerja, kurangnya fokus, dan penurunan produktivitas. Ketersediaan peralatan medis dan non-medis dianggap masih kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan di lapangan akibat keterbatasan fasilitas penyimpanan. Hal ini berpotensi menghambat penanganan korban bencana tanah longsor.

Aksi Kesiapsiagaan Yang Telah Dilakukan Bapena PPNI Untuk Membantu Mengatasi Korban Bencana Tanah Longsor

Bapena PPNI pada tahap kesiapsiagaan memerlukan serangkaian tindakan yang mampu mencerminkan kesiapan organisasi secara nyata dan terukur dalam menghadapi potensi bencana tanah longsor. Dengan kesiapan yang matang tindakan ini nantinya mampu memastikan bahwa organisasi tersebut dapat segera bergerak untuk memenuhi kebutuhan dasar korban bencana tanah longsor atau masyarakat terdampak. Adapun aksi yang telah dilakukan Bapena dalam membantu mengatasi korban bencana di lingkup kesiapsiagaan mencakup kesiapan sumber daya manusia, kelembagaan maupun pendanaan untuk

mendukung respon darurat yang efektif (Frederika et al, 2023).

1. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai ukuran yang menunjukkan ketersediaan anggota yang penting bagi keberhasilan tujuan yang diinginkan. Ketersediaan SDM berhubungan dengan ketersediaan personil, ketersediaan personil mencerminkan sejauh mana organisasi memiliki tenaga kerja yang siap sedia dan terlatih untuk menangani korban bencana tanah longsor setiap saat. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kecukupan jumlah personil, tetapi juga dengan kualitas dan keterampilan yang dimiliki, Personil yang memadai, dengan keahlian yang relevan, memastikan respons dalam memenuhi kebutuhan dasar korban. Bapena PPNI memiliki jumlah anggota yang terbatas dan dibagi berdasarkan tahap bencana, pelaksanaan tugas di lapangan seringkali disesuaikan dengan ketersediaan personil. Pengetahuan dan keterampilan anggota terus dikembangkan melalui pendidikan keperawatan dan pelatihan baik di tingkat lokal maupun nasional. Selain itu, pengalaman langsung di lapangan juga berperan penting dalam

membentuk sikap dan kemampuan anggota dalam menangani korban bencana. Sebagian besar anggota yang terlibat memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai dalam penanggulangan bencana sehingga respons yang diberikan dapat optimal.

2. Kelembagaan

Menurut Ostrom (1990) (dalam Julianto & Herlambang, 2021) kelembagaan adalah seperangkat aturan dalam masyarakat yang mengatur hak dalam pengambilan keputusan, menentukan tindakan yang diperbolehkan dan dilarang, serta menetapkan ketentuan yang berlaku secara umum. Untuk memastikan efektivitas aturan yang diterapkan, penguatan kapasitas kelembagaan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara berbagai pihak agar kelembagaan dapat berfungsi secara optimal. Selain itu, kelembagaan yang kuat juga membantu organisasi mengelola tantangan internal dan eksternal dengan lebih baik. Struktur kelembagaan yang jelas memungkinkan koordinasi yang efektif antar pihak, baik di dalam maupun di luar organisasi, sehingga respons terhadap situasi darurat dapat

dilakukan secara lebih cepat dan terarah.

Bapena PPNI memiliki struktur organisasi yang telah ditetapkan dengan jelas. Struktur ini tidak hanya menggambarkan alur pengambilan keputusan, tetapi juga mencakup pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab dari setiap anggotanya untuk memastikan kelancaran operasional dan pencapaian visi misi organisasi. Selain itu, Bapena PPNI melakukan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah maupun dengan organisasi independen lainnya, baik itu dengan Dinas Kesehatan, PMI, BPBD, rumah sakit, puskesmas, dan lainnya.

3. Pendanaan

Pendanaan memainkan peran yang sangat krusial dalam memastikan kelancaran penanganan bencana karena menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk membiayai berbagai kebutuhan dalam tahap tanggap darurat. Dana tersebut akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan baik untuk mendukung kebutuhan logistik, pelatihan, serta pemberdayaan

masyarakat dalam menghadapi bencana. Alokasi dana dalam hal ini bersumber dari suatu pendapatan yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu dalam penanganan korban bencana. Sehubungan dengan hal tersebut, Bapena PPNI Kota Semarang mengumpulkan donasi untuk disalurkan pada masyarakat yang terdampak bencana tanah longsor, baik itu berupa bantuan alat sekolah, sembako, alat kebersihan, dan lainnya untuk membantu masyarakat dalam proses pemulihan dari bencana.

Kesesuaian Kesiapsiagaan Bapena PPNI Kota Semarang Dengan Teori dan Konsep Manajemen Bencana

Berdasarkan teori manajemen bencana yang dikemukakan oleh Nick Carter, kesiapsiagaan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang memungkinkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi, komunitas, dan individu, untuk merespons situasi bencana secara cepat, dan efektif. Tindakan kesiapsiagaan ini mencakup berbagai aspek penting, seperti perumusan rencana bencana yang komprehensif dan layak, pemeliharaan serta pengelolaan sumber daya yang diperlukan, serta pelatihan dan peningkatan kapasitas personil yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Begitu juga dengan konsep kesiapsiagaan yang tertera

dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta konsep dari kajian LIPI-UNESCO/ISDR.

Kesiapsiagaan Bapena PPNI Kota Semarang yang telah dijalankan sepenuhnya menyesuaikan dan berpedoman pada teori serta konsep yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini tercermin dalam berbagai langkah konkret yang diambil oleh Bapena PPNI, di mana upaya implementasi diterapkan untuk mengantisipasi juga merespon potensi risiko akibat bencana tanah longsor yang mungkin terjadi. Bapena PPNI Kota Semarang sejauh ini telah melaksanakan berbagai langkah kesiapsiagaan, langkah-langkah tersebut mencakup pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan anggota. Selain itu, Bapena Kota Semarang juga telah menyusun rencana evakuasi yang jelas dan terstruktur. Bapena juga telah menyiapkan berbagai instrument yang berkaitan dengan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan, seperti alat medis, obat-obatan, sistem komunikasi, dan lainnya. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam menangani korban bencana, Bapena PPNI mampu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Dalam pengelolaan sumber daya organisasi, baik dari Sumber Daya Manusia (SDM) maupun pendanaan,

Bapena PPNI mampu memastikan bahwa anggotanya memiliki keterampilan memadai yang dikelola atau dikelompokkan sesuai dengan keahlian masing-masing anggota dan untuk aspek pendanaan, Bapena telah mampu membelanjakan dana secara efisien, yang mencakup alokasi anggaran untuk kebutuhan operasional organisasi maupun kebutuhan darurat masyarakat terdampak.

KESIMPULAN

Kesiapsiagaan tim Bapena PPNI dalam menangani korban bencana tanah longsor belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator kemampuan mobilisasi sumber daya, di mana Bapena PPNI belum mengadakan pelatihan secara mandiri bahkan pelatihan dan simulasi bencana di Bapena PPNI belum terkoordinir dengan baik. Walaupun memang terhambatnya pelaksanaan ini juga disertai oleh adanya proposal kegiatan yang belum disetujuinya oleh pusat sehingga Bapena PPNI tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pelatihan dan simulasi bencana secara mandiri. Selain itu, terdapat kendala lain dalam pemenuhan sumber daya kesehatan mulai dari personil yang tidak bisa *stand by* di tempat karena mendapat panggilan tugas dari Dinas Kesehatan atau tempat bekerjanya, maupun peralatan medis yang belum lengkap

ketersediaanya karena tempatnya yang belum memadai.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, saran yang dapat peneliti sampaikan untuk mengoptimalkan kesiapsiagaan Bapena PPNI Kota Semarang terkait pelatihan dan simulasi bencana serta kemampuan mobilisasi sumber daya organisasi, sebagai berikut:

1. Jika proposal pelatihan dan simulasi bencana belum disetujui, Bapena PPNI Kota Semarang dapat memulai dengan kegiatan internal yang lebih sederhana, seperti pelatihan dasar mengenai penanggulangan bencana atau simulasi evakuasi korban, yang bisa dilakukan menggunakan sumber daya yang ada dengan memanfaatkan relawan atau personil yang sudah memiliki pengalaman dalam penanggulangan bencana, baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dengan mengundang narasumber yang berkompeten dapat menjadi langkah efektif untuk memberikan pelatihan dan simulasi bencana kepada anggota Bapena PPNI Kota Semarang.
2. Bapena PPNI Kota Semarang dapat mengadakan sosialisasi atau *workshop* sebagai alternatif dari praktik pelatihan dan simulasi mengenai kesiapsiagaan

bencana tanah longsor bagi anggota organisasi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran anggota akan pentingnya penanggulangan bencana.

3. Bapena PPNI Kota Semarang dapat bekerja sama dengan lembaga lain untuk membuat fasilitas penyimpanan bersama (*shared storage*) yang dikelola bersama dengan pihak yang memiliki ruang dan kapasitas berlebih beserta alternatif lain dapat dilakukan dengan memanfaatkan penyimpanan peralatan medis di fasilitas mitra dengan jaminan keamanan untuk mengatasi tempat penyimpanan peralatan medis yang tidak memadai.
4. Bapena PPNI Kota Semarang dapat membentuk tim siaga bergilir dengan membuat jadwal piket sistem rotasi sehingga tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada orang tertentu. Dalam hal ini identifikasi personil diperlukan pada personil yang sekiranya tidak *double job* untuk menjadi personil siaga jika terdapat personil lain yang bertepatan mendapatkan tugas dan tanggung jawab di lain tempat.
5. Bapena PPNI Kota Semarang harus memiliki alur komando yang jelas dalam menurunkan personil di lapangan, hal ini untuk mengantisipasi timbulnya perintah dua arah yang berbeda yang mengakibatkan perintah

organisasi tidak terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Y. N., Ratnawati, R., Keperawatan, J. I., Yati, K., & Azizah, N. (2015). Pengalaman Perawat Dalam Melakukan Penilaian Cepat Kesehatan Kejadian Bencana Pada Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Kelud Tahun 2014 Di Kabupaten Malang (Studi Fenomenologi). 3(2), 129–143.
- BPBD Kota Semarang. (2021). Rekapitulasi Kejadian Bencana Th. 2021
- BPBD Kota Semarang. (2022). Data Bencana Alam di Kota Semarang Th. 2022
- BPBD Kota Semarang. (2023). Data Bencana Alam di Kota Semarang Th. 2023
- BPS Kota Semarang. (2024). Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²), 2021-2023. Diakses pada 18 Oktober 2024, dari <https://semarangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDgjMg==/kepadatan->.
- Carter, W. N. (1991). Disaster Management. In *Global Surgery and*

- Anesthesia Manual: Providing Care in Resource-Limited Settings*. Asian Development Bank.
- DIBI BNPB. (2023). Statistik Bencana Menurut Jenis. Diakses pada 18 Oktober 2024, dari <https://dibi.bnppb.go.id/home/index2>.
- Dinas Pertanian Kota Semarang. (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pertanian Kota Semarang*. 1.
- Doondori, A. K., Paschalia, Y. P. M., Studi, P., Ende, K., & Kupang, K. (2021). Peran Perawat dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Kesehatan Primer*, 6(1), 52–70.
- Frederika. A, Anak Agung Diah Parami Dewi, M. A. S. (2023). Analisis Identifikasi Aspek dan Indikator Desa Tangguh Bencana dalam Penanggulangan Risiko Bencana dengan Metode Hanlon di Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung. *Jurnal Ilmiah teknik sipil a Scientificjournal Of civil Engineering*, 27(2), 257–266.
- Ihsan, F., Eli Kosasih, C., Emaliyawati, E., Kunci, K., & Bencana, M. (2022). Kesiapsiagaan Perawat dalam Menghadapi Bencana: Literature Review. *Faletehan Health Journal*, 9(1), 66–79.
- Julianto, E. A., & Herlambang, S. (2021). *Kelembagaan Jurnal dan Kemandirian Lembaga*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
- LIPI-UNESCO/ISDR. (2006). *Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Zahra, P. A. A., Yesiana, R., Anggraini, P., & Harjanti, I. M. (2021). Analisis Perkembangan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lahan Terbangun Di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 15(1), 47–55.